

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Indriyanto Seno, 2012, *Korupsi dan Permasalahannya*, Daidit Media Press, Jakarta.
- Alimuddin, H. Supriadi dan, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- AR, Suhariyono, 2001, *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia (Pidana Denda Sebagai Saksi Alternatif)*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Arikunto, Suharsmi, 2014, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan ke-15, PT. RinekaCipta, Jakarta.
- Asikin, Zainal, Amiruddin dan, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, “*Struktur hukum dan hukum struktural Indonesia*”, Dalam *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Bakri, M., 2013, *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Era Reformasi*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, Prenanda Media Group, Jakarta.
- Dimiyati, Johni, 2013, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, Kencana, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Huseng, Rohana, Muhammad Djafar Saidi dan, 2010, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, Cetakan Ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Magnar, Kuntana, Bagir Manan dan, 1987, *Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, Alumni, Bandung.

- Mamudji, Sri, Soerjono Soekanto dan, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Maringka, Jan S., 2018, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung.
- Moelyatno, 2014, “*Asas-asas hukum pidana*” dalam Juju Samsudin Saputra, *Pidana Denda*, Deepublish, Sleman.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian, Cetakan Pertama*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*”, dalam Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Prasetyo, H.M., *Catatan Kritis Terhadap Pelaksanaan Hukum Acara Tindak Pidana Perikanan*, disampaikan sebagai narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan an Pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Jakarta, Rabu, tanggal 29 Juli 2016.
- Purwoleksono, Didik Endro, 2019, *Hukum Pidana : Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 2014, dalam Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI-Press, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Solihin, Akhmad, 2010, *Politik Hukum Kelautan & Perikanan: Isu, Permasalahan dan telaah kritis kebijakan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

- Sudjito, 2014, *Ilmu hukum holistik: studi untuk memahami kompleksitas dan pengaturan pengelolaan irigasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian dan Tesis*, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, Ismu Gunadi, Titik Triwulan dan, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Yusni, Muhammad, 2019, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Airlangga University Press, Surabaya.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

*United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian rumusan kamar pidana tentang perikanan (*illegal fishing*).

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-053/A/SKJA/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Petunjuk terkait Eksekusi Hukuman Denda dalam Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilakukan Nelayan/Orang Asing.

### C. Tesis dan Jurnal

Gumbira, Seno Wibowo, 2016, "Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana)", Jurnal Hukum & Pembangunan 46, Nomor 1 (2016): 106-119.

Kusuma, Winanda, 2016, "Relevansi Hukum Internasional Terhadap Tindakan Pencegahan Illegal Fishing Yang Terjadi di Indonesia (Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Riau)", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mardhikawati, Ratih, 2019, "Penegakan Hukum Kapal Ikan Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Susetyorini, Peni, 2019, "Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982", Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No. 2, April 2019.

Zainal, Muh Asrianto, 2007, "Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika dan Psikotropika (Studi Kasus di

Wilayah Hukum Sulawesi Tenggara)”, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

#### **D. Internet**

Tempo.Co, Fakta-fakta Seputar Pencurian Ikan, <https://m.tempo.co/read/news/2014/11/01/090618747/fakta-fakta-seputar-pencurian-ikan>, diakses tanggal 26 Maret 2020.

Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan, Efek Jera Tindak Pidana Perikanan Harus Menerima Sanksi Hukum Berat dan Kewajiban Membayar Denda Pemulihan Sumber Daya Ikan, <http://www.kiara.or.id/efek-jera-tindak-pidana-perikanan-harus-menerima-sanksi-hukum-berat-dan-kewajiban-membayar-denda-pemulihan-sumber-daya-ikan/>, diakses tanggal 26 Maret 2020.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mahkamah Agung dan KKP Buka Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan, <https://kkp.go.id/artikel/10339-mahkamah-agung-dan-kkp-buka-pendaftaran-calon-hakim-ad-hoc-pengadilan-perikanan>, diakses tanggal 29 Maret 2020.

Sunarmi, *Membangun Sistem Peradilan di Indonesia*, <http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-sunarmi3.pdf>, di akses tanggal 27 April 2020.

#### **E. Lain-lain**

Pusat PUU BK DRI RI, Rancangan Undang-Undang Perikanan, Senin 2 April 2018.

Berkas Perkara Pidana Nomor Register Perkara: PDM-211/PONTI/06/2019 atas nama terdakwa NGUYEN VAN TUE pada Kejaksaan Negeri Pontianak, Tahun 2019.

Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak bersurat kepada Duta Besar Republik Sosialis Vietnam di Jakarta melalui surat Nomor: B-4437/O.1.10/Eku.3/08/2019, tanggal 30 Agustus 2019 perihal mohon bantuan eksekusi perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan warga negara Vietnam atas nama terpidana Nguyen Van Tue.